

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN TAHUN 2025

Keputusan DPRD ini memuat rekomendasi atas LKPJ Bupati Kebumen Tahun 2025 untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya serta penyusunan kebijakan daerah. Rekomendasi umum menekankan perbaikan akurasi dan integrasi data, penyajian LKPJ yang lebih ringkas dan berbasis indikator kinerja, pengukuran kinerja berdasarkan outcome dan dampak bagi masyarakat, optimalisasi PAD terutama dari opsen pajak dan pajak penerangan jalan, serta penyampaian LKPJ lebih awal agar tersedia waktu yang memadai untuk evaluasi.

Rekomendasi sektoral mencakup peningkatan beasiswa dan pencegahan putus sekolah; pembenahan pengelolaan pariwisata; peningkatan kualitas rumah sakit pemerintah dan akses BPJS bagi masyarakat kurang mampu; peningkatan mutu jalan, irigasi, drainase dan PJU; percepatan penanganan RTLH dan rumah terdampak bencana; perbaikan layanan sosial dan perlindungan perempuan dan anak; pengelolaan sampah MBG; penguatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam perencanaan; pembenahan penempatan dan disiplin ASN; penguatan pengelolaan desa, UMKM, koperasi dan pertanian; peningkatan layanan administrasi kependudukan dan keamanan informasi; serta penguatan fungsi pengawasan dan pengadaan barang/jasa.

Catatan:

- Keputusan ditetapkan di Kebumen pada 8 Mei 2026.
- Rekomendasi merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen terhadap LKPJ Bupati Kebumen Tahun 2025.
- Rekomendasi wajib ditindaklanjuti Bupati dan seluruh OPD sebagai bahan perencanaan, penganggaran, serta penyusunan Perda, Perbup, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- Ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Saman.
- Dokumen terdiri atas 22 halaman.

Tag/Keyword: LKPJ 2025; Rekomendasi DPRD; Kinerja Pemerintah Daerah; Pelayanan Publik; Evaluasi Pembangunan; DPRD Kabupaten Kebumen

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. DPRD RECOMMENDATIONS ON THE REGENT OF KEBUMEN'S 2025 ACCOUNTABILITY REPORT

This DPRD Decision contains recommendations on the Regent of Kebumen's 2025 Accountability Report (LKPJ) to be followed up in current and subsequent planning and budgeting processes and in the formulation of regional policies. The general recommendations emphasize improving data accuracy and integration, presenting the LKPJ in a more concise and performance-oriented format, measuring government performance based on outcomes and public impact, optimizing Regional Own-Source Revenue, particularly tax-related revenues, and submitting future LKPJ documents earlier to allow sufficient time for evaluation.

Sectoral recommendations cover scholarships and school dropout prevention; tourism management; public hospital services and health insurance access for low-income residents; the quality of roads, irrigation, drainage and street lighting; uninhabitable housing and disaster-affected homes; social services and protection of women and children; waste management; incorporation of DPRD's community aspirations into development planning; civil servant placement and discipline; village governance, MSMEs, cooperatives and agriculture; population administration and information security; as well as stronger internal oversight and procurement management.

Note:

- *The Decision was stipulated in Kebumen on 8 May 2026.*
- *The recommendations resulted from the DPRD Budget Committee's review of the Regent's 2025 LKPJ.*
- *The Regent and all regional government agencies are required to follow up the recommendations in planning, budgeting, and regional policy formulation.*
- *The document is signed by Saman, Chairperson of the Kebumen Regency DPRD.*
- *The document consists of 22 pages.*

Keywords: 2025 LKPJ; DPRD Recommendations; Regional Government Performance; Public Services; Development Evaluation; Kebumen Regency